INOVASI SOSIAL DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGELANG

Andjar Prasetyo
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Asrori
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Catur Wibowo Budi
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Deden Nuryadin
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Gunawan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang menjadi konsumsi publik di semua negara di dunia ini, oleh karenanya diciptakan berbagai model untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dan menganalisis strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lokus kajian di Kabupaten Magelang. Analisis kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan mendeskripsikan hasil kajian. Pelaksanaan kajian selama tiga bulan mulai Juli sampai dengan Oktober 2019. Data sekunder dominan digunakan dalam kajian ini dan data primer diperoleh dari hasil focus group discussion dengan stakeholder terkait. Kajian ini mampu memberikan pendalaman ilmiah tentang bentuk inovasi sosial yang berdampak pada percepatan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan kepekaan kebijakan daerah untuk memberikan ruang dalam proses inovasi sosial. Hasil utama kajian ini adalah perlu adanya strategi parsial dengan cakupan meliputi Intensifikasi Pertanian dari Sektor Pertanian Kecil, Sektor Pertanian Komersial yang lebih Dinamis, stimulasi Pertumbuhan Sektor Pedesaan Non Pertanian, Migrasi Orang Muda dan Penyediaan Jaring Pengaman bagi mereka yang "Terperangkap" dalam Kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, inovasi sosial, kebijakan daerah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang menjadi konsumsi publik di semua negara di dunia ini, oleh karenanya diciptakan berbagai model untuk mendorong percepatan penanggunalan kemiskinan. Masalah ini merupakan hal yang tidak pernah dituntaskan dari satu rezim pemerintahan ke rezim pemerintahan yang berikutnya, meskipun setiap rezim pemerintahan telah berupaya dengan berbagai paket kebijakan dan program serta kegiatan yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan.

Rumusan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sampai saat ini belum ada sistem penanganan kemiskinan yang berkelanjutan (sustainable). Hampir setiap rezim yang berkuasa selalu menonjolkan dan memberi perhatian terhadap orang miskin dengan memberi solusi, menciptakan kebijakan dan program yang sifatnya dari atas (top down). Apabila dicermati kebijakan dan program penanganan kemiskinan banyak bertumpu

pada pendekatan politik, kewilayahan, kelompok. Dalam konteks inovasi ada beberapa literatur yang membahasnya seperti (Millard et al., 2016) yang membahas data kelola dan kebijakan implikasi inovasi social, (Pansera and Martinez, 2017) yang membahas topik inovasi yang muncul di negara-negara berkembang dalam penanggulangan kemiskinan, (FAO, 2018) yang membahas intervensi inovasi digital dalam penanggulangan kemiskinan dan (Avais, 2015) yang membahas inovasi keuangan, dampaknya terhadap daerah pedesaan dan membahas bagaimana beberapa produk keuangan inovatif membantu dalam inklusi keuangan bagi orang miskin. Sementara itu di Indonesia secara tidak langsung sudah memiliki beberapa inovasi social yang telah dilaksanakan secara nasional pada rezim pemerintahan yang mengusung nawacita sebagai induk dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan memang menjadi kendala di semua wilayan tetapi juga produk unggulan dalam berbagai aktivitas politik. Dalam konteks konstruktif pada aktivitas politik akan muncul hasil yang positif dalam penanggulangan kemiskinan, ditandai dengan koridor kebijakan berbentuk peraturan. Salah satu kebijakan yang diusung dalam Kabupaten Magelang adalah adanya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang yang mengamanatkan tentang upaya mencegah dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Magelang. Data BPS 2019, menunjukan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dalam periode 2012-2018 (gambar 1) dan dibawah persentase kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 11,32% pada tahun 2018 sedangkan Kabupaten Magelang sebesar 11,23%, yang dapat menjadi rujukan terhadap progress percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang

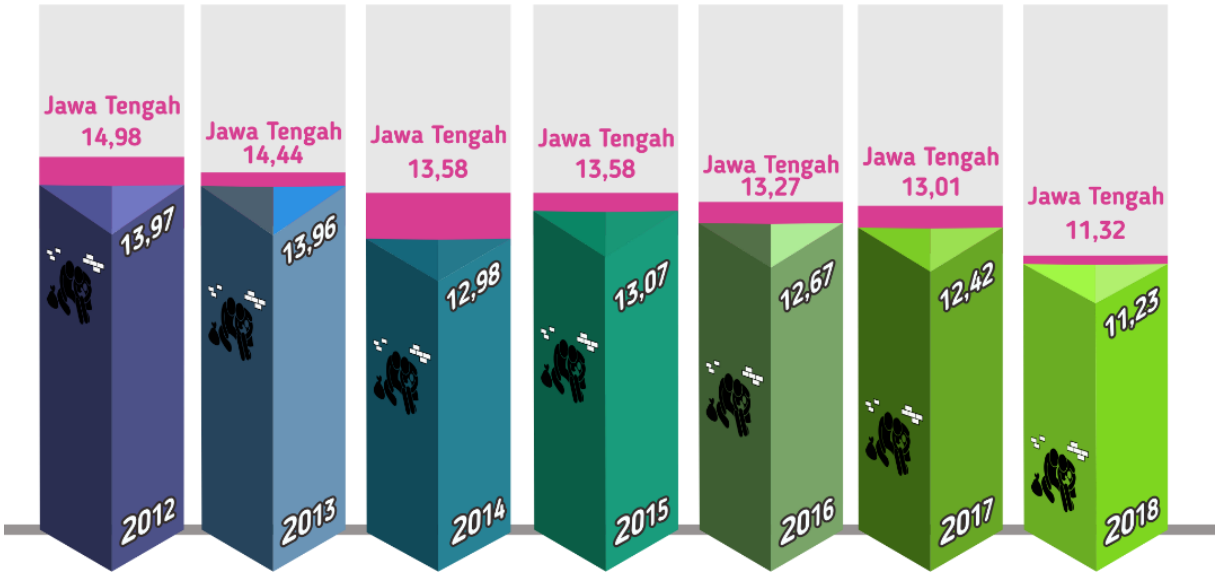

Sumber : BPS, 2019
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kab. Magelang dan Prov. Jateng Tahun 2012 2018.

Namun kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, termasuk di Kabupaten Magelang, menjadi penting untuk melihat lebih rinci potret kemiskinan yang ada atau mendeskripsikan dari kondisi nyata terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya dapat dilakukan intervensi inovasi social dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Kajian ini menarik untuk didiskusikan dalam rangka menambah referensi upaya inovasi dalam berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Tujuan kajian ini adalah mengevaluasi inovasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dan menganalisis strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lokus kajian di Kabupaten Magelang.

LANDASAN TEORI

Inovasi Sosial

Inovasi dapat didefinisikan sebagai kondisi yang diperlukan untuk modernisasi pemerintah untuk memenuhi tantangan sosial baru. Salah satu bapak pendiri teori inovasi modern, Joseph Schumpeter (1942), mendefinisikan inovasi sebagai proses penghancuran kreatif di mana 'kombinasi baru sumber daya yang ada' dicapai. Inovasi itu sendiri sebagian besar telah didefinisikan sebagai "ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi" (Rogers, 2003; Fagerberg et al., 2005) dalam (Pollitt, 2011).

Ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh pemerintah pusat atau unit adopsi (pemerintah daerah) dalam proses pengentasan kemiskinan mengarah pada bagaimana merubah kondisi sosial yang ada.

Inovasi membutuhkan perubahan dan kemauan untuk belajar, tetapi perubahan tidak selalu harus inovatif, sementara proses pembelajaran tidak selalu mengarah pada ide-ide baru, praktik, dan sebagainya (Rogers, 2003; Osborn dan Brown, 2005; Veenswijk, 2006) dalam (Pollitt, 2011). Faktor penting adalah seberapa radikal inovasi itu; apa 'kebaruan' dari perubahan yang telah terjadi dan apa sifat dari proses pembelajaran yang telah mengarah pada kesediaan untuk berubah? Perbedaan dapat dibuat antara a) inovasi tambahan, yang dapat didefinisikan sebagai perubahan kecil dalam layanan dan proses yang ada; b)inovasi radikal, yang secara fundamental mengubah cara yang ada mengatur atau memberikan layanan serta menghasilkan produk dan layanan baru; dan c) inovasi sistematis atau transformatif, yang didefinisikan sebagai transformasi besar yang muncul (Mulgan dan Albery, 2003) dalam (Pollitt, 2011).

Menurut McDaniel (2002), penting juga untuk membuat perbedaan antara inovasi evolusioner dan revolusioner. Inovasi evolusioner terjadi dalam suatu organisasi secara bertahap, memungkinkan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kecil dalam lingkungan internal dan eksternalnya. Inovasi revolusioner bukan bagian dari proses normal adaptasi dan perubahan, tetapi menciptakan pergolakan besar dalam suatu industri atau sektor kebijakan. Mereka mewakili terobosan besar dan membuat

perubahan besar. Namun, yang penting adalah bahwa inovasi membuat perbedaan, sedemikian rupa sehingga para aktor yang terlibat memandang inovasi sebagai diskontinuitas dengan masa lalu (Osborn dan Brown, 2005) dalam (Pollitt, 2011).

Selanjutnya inovasi disebutkan dalam (Harris, 2011) mengkategorikan perusahaan yang sukses dan inovatif dalam empat model bisnis inovasi yang diinginkan: 1)gagasan dan pemimpin, 2)gagasan dan proses, 3)gagasan dan motivasi, dan 4)gagasan, pemimpin, tim dan rencana.

Inovasi sosial (Leoncini and Montresor, 2008) adalah inovasi yang didasarkan pada tujuan sosial dan proses sosial. Inovasi sosial (Young Foundation, 2006) dan inovasi bisnis, bagaimanapun, sering tumpang tindih dan terjalin. Telepon seluler adalah inovasi sosial dan inovasi bisnis sekaligus: melayani tujuan sosial bagi mereka yang menggunakannya, dan menghasilkan nilai ekonomi bagi mereka yang memproduksinya dan untuk masyarakat. Model baru telepon seluler mungkin belum tentu merupakan inovasi sosial jika tidak melayani tujuan sosial tertentu (baru). Untuk memahami dan menganalisis tujuan sosial dan nilai suatu inovasi dapat menjadi pendorong penting dari inovasi bisnis.

Aspek lain dari inovasi sosial selain tujuan sosial dan nilai sosial adalah proses sosial dan difusi inovasi. Semua proses inovasi, inovasi bisnis, inovasi sosial atau inovasi dengan hati-hati, dapat, sebagaimana diindikasikan, dapat dikatakan terdiri dari dua proses terkait: eksplorasi dan eksploitasi (March, 1991) dalam (Leoncini and Montresor, 2008), variasi dan seleksi (Nelson dan Musim Dingin, 1977), atau penemuan dan difusi (Rogers, 1995). Gagasan dikembangkan, dan kemudian beberapa gagasan ini dipilih dan ditingkatkan menjadi lebih penting atau lebih bijaksana daripada yang lain. Mekanisme seleksi dapat menjadi "kebijaksanaan orang banyak" (Surowiecki, 2004), atau mungkin pembuat opini atau elit masyarakat yang berusaha untuk "memilih pemenang".

Bentuk Inovasi Sosial

Pemerintah telah dan sedang melaksanakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam beberapa model. Model ini diyakini merupakan menjadi jawaban terhadap kondisi yang diperlukan dalam modernisasi pemerintah untuk memenuhi tantangan sosial baru. Mengacu pada (TNP2K, 2017), setidaknya terdapat 9 model dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang meliputi **1)Kartu Perlindungan Sosial (KPS)** adalah kartu dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial dan Bantuan Langsung Sementara Masyarkat tahun 2013. Pada tahun 2015, KPS secara bertahap berubah menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang kurang lebih sama dengan KPS akan tetapi dengan berbagai perubahan format dan tambahan informasi di dalam kartu tersebut untuk memudahkan pemerintah yang baru terbentuk untuk menyalurkan bantuan sosial; 2) **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Selain itu, juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel; 3)**Kartu Indonesia Sehat (KIS)** dapat digunakan untuk mendapatkan layanan

kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS; 4) **BPJS Kesehatan peserta mandiri** adalah mereka yang memiliki Kartu BPJS Kesehatan dimana iurannya dibayar secara mandiri; 5) **Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)** adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang layak yang diberikan kepada setiap pekerja yang telah membayar iuran; 6) Asuransi kesehatan lainnya adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan. Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun perusahaan asuransi umum; 7) **Program Keluarga Harapan (PKH)** adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: i)menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan dan menghadiri kelas minimal 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program; 8) **Beras untuk orang miskin (Raskin)** adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan 9) **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** merupakan salah satu sistim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan Daerah

Konteks kebijakan pemerintah pusat dijelaskan dalam (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010) yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan ini menjabarkan tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi penting karena kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Di samping itu untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan;

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 1)Beban pengeluaran masyarakat miskin dikurangi; 2)Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3)Usaha Mikro dan Kecil dikembangkan dan menjamin keberlanjutan; 4)Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 1)Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2)Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 3)Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; 4)Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selanjutnya dalam (Pemerintah Kabupaten Magelang, 2008) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristik merupakan masalah yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; penanggulangannya adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya untuk menanggulangi kemiskinan berdasarkan asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas bertujuan mencegah dan mengurangi kemiskinan. Lebih rinci bahwa ruang lingkup

penanggulangan kemiskinan meliputi : 1)Peningkatan kesempatan pendidikan. 2)Peningkatan derajat kesehatan; 3)Peningkatan kemampuan berusaha; 4)Peningkatan kemampuan modal usaha.

Kemiskinan

Definisi kemiskinan dalam (Soubbotina, World and Washington, 2004) yang lebih luas sebagai fenomena multidimensi mengarah pada pemahaman yang lebih jelas tentang penyebabnya dan kebijakan yang lebih komprehensif yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan. Misalnya, di samping masalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, ia membawa ke depan akses yang adil ke layanan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sistem jaminan sosial. Strategi pengentasan kemiskinan juga harus memungkinkan fakta bahwa berbagai aspek kemiskinan saling berinteraksi dan saling memperkuat. Misalnya, meningkatkan jaminan sosial tidak hanya membuat orang miskin merasa kurang rentan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari peluang risiko yang lebih tinggi, seperti pindah ke lokasi lain atau mengubah kualifikasi. Dan peningkatan representasi dan partisipasi orang miskin tidak hanya membantu mereka mengatasi perasaan dikucilkan dari masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penargetan yang lebih baik atas layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 tahun 2008 didefinisikan bahwa miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal diantaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang memadahi yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga miskin Kabupaten Magelang. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua / mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. Kemudian secara lebih rinci disebutkan bahwa Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan.

Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan melibatkan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi : 1)Perluasan kesempatan pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup. 2)Pemberdayaan masyarakat miskin. 3)Perlindungan sosial. 4) Kemitraan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Deskripsi kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan menjelaskan secara terperinci hasil kajian berdasarkan pada proses mengumpulkan atau menghasilkan data, mencatat bagaimana mengatasi masalah utama yang terkait dengan metode yang digunakan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Magelang.

Target/Subjek Penelitian

Target penelitian adalah kemiskinan dan intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan jumlah populasi sebanyak anggota rumah tangga dan rumah tangga yang terdapat

pada Basis Data Terpadu di Kabupaten Magelang tahun 2018. Teknik memperoleh subjek dilakukan melalui proses pivotable yang terdapat pada program pengolah data, proses ini berfungsi untuk mengelompokan data sesuai dengan Batasan instrument kajian yang dibutuhkan.

Prosedur

Pengamatan non-partisipatif dan partisipatif menjadi prosedur dalam kajian ini, dengan mengamati para obyek kajian utamanya pada bentuk data tanpa terlibat dalam kegiatan yang sama dan pengamatan partisipatif mengharuskan untuk terlibat dalam kegiatan obyek yang diteliti, dan untuk mencatat pengamatan sistematis yang diformalkan dalam focus group discussion.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer berasal dari *focus group discussion*, untuk menggali secara langsung terhadap aktivitas yang telah dan sedang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Data sekunder yang terbagi dalam tiga instrument pokok, 1) data dasar penduduk miskin, 2) data asset penduduk miskin; 3) data instalasi penduduk miskin bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dirangkum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, disamping BDT didukung dengan laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) tahun 2018 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Magelang Tahun 2018.

Teknik Analisis Data

Secara terperinci menjelaskan tentang strategi yang akan digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data percepatan penanggulangan kemiskinan, seperti proses penulisan kode dan memo dan penggunaan teori dan literatur untuk memahami data dan transferabilitas temuan. Analisis data penanggulangan kemiskinan dideskripsikan dalam bentuk gambar dan angka untuk menguatkan proses kajian dan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbatasan dengan Temanggung, Wonosobo, Boyolali, Purworejo dan DI Yogyakarta – Kota Magelang. Berdasarkan UU No. 13/1950 Ibukota Kabupaten di Kota Mungkid dengan Luas Wilayah Kabupaten Magelang : 1.085,73 km^2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sesuai dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang sebanyak 1.268.396 jiwa, dengan sebaran Prosentase jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 adalah Grabag sebesar 2,47%; Mertoyudan sebesar 3,07%; Candimulyo sebesar 3,63%; Muntilan sebesar 3,75%; Kajoran sebesar 3,85%; Windusari sebesar 3,87%; Secang sebesar 3,93%; Sawangan sebesar 3,97%; Dukun sebesar 4,20%; Mungkid sebesar 4,29%; Srumbung sebesar 4,39%; Borobudur sebesar 4,54%; Tegalrejo sebesar 4,57%; Salaman sebesar 4,57%; Kaliangkrik sebesar 4,65%; Pakis sebesar 5,56%; Bandongan sebesar 5,92%; Salam sebesar 6,32%; Ngluwar sebesar 6,51%; Ngablak sebesar 6,82%; dan Tempuran sebesar 9,12%.

Mengacu pada BDT, Anggota Rumah Tangga (ART) miskin seperti dalam gambar berikut:

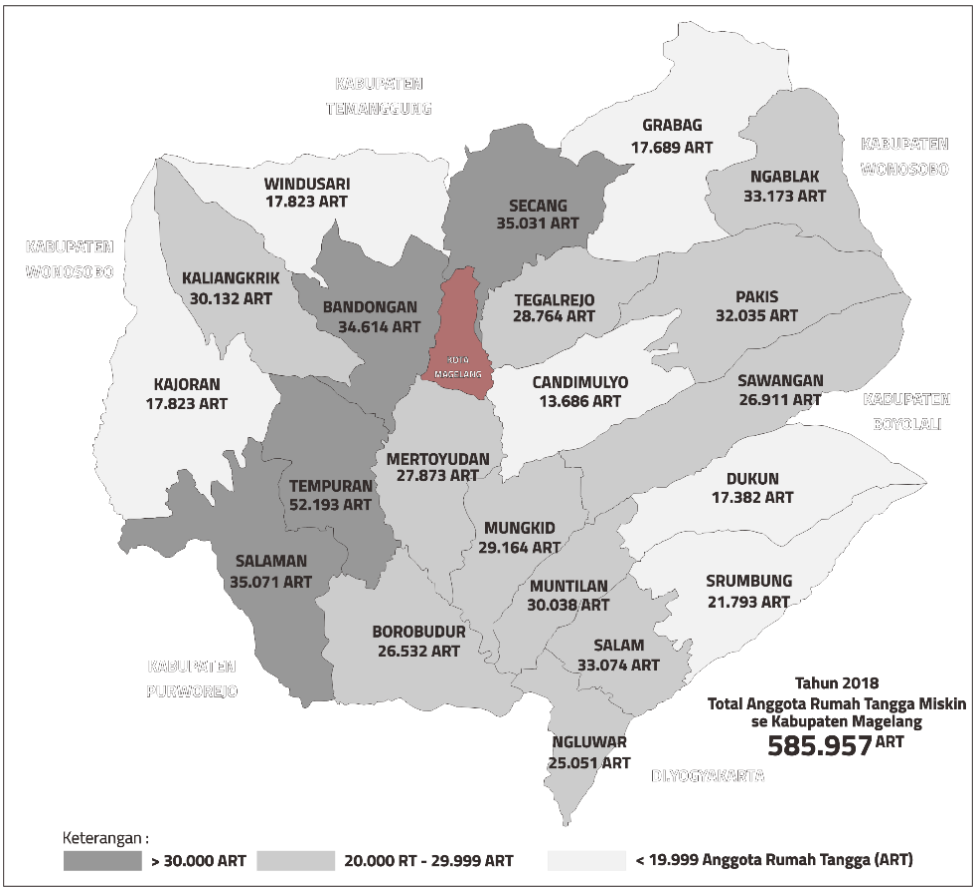

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, Digambar oleh peneliti, 2019
Gambar 2. Sebaran Anggota Rumah Tangga (ART) Miskin tingkat Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

Peta ART miskin dalam batasan wilayan di Kabupaten Magelang tersebut terbagi dalam tiga zonasi, yaitu anggota rumah tangga miskin tingkat kecamatan sebanyak lebih dari 30.000 orang ditandai dengan warna hitam sebanyak 4 (empat) Kecamatan : Secang, Bandongan, Salaman dan Tempuran, anggota rumah tangga miskin tingkat kecamatan sebanyak 20.000 sampai dengan 29.999 orang, yang ditandai dengan warna hitam keabu-abuan banyak 11 (sebelas) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kaliangkrik, Tegalrejo, Mertoyudan, Borobudur, Mungkid, Muntilan, Ngluwar, Salam, Sawangan, Pakis dan Ngablak dan anggota rumah tangga miskin tingkat kecamatan sebanyak kurang dari 19.999 orang yang ditandai dengan warna abu-abu yaitu Grabag, Candimulyo, Dukun, Srumbung, Windusari dan Kajoran. Dengan potret seperti dalam gambar tersebut percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan strategi secara parsial, yang disesuaikan dengan akumulasi ART dan masalah yang dihadapi pada setiap kecamatan.

Indikator dalam BDT selain mendata jumlah penduduk miskin, juga mendeskripsikan secara kuantitas kondisi lingkungan tiap kecamatan. Salah satu kondisi yang menjadi indikator adalah bangunan rumah tangga yang diidentifikasi secara kuantitas, meliputi jenis bangunannya, lahan yang dimiliki, dinding

bangunan yang ditempati, atap bangunan rumah tangga.

Hasil identifikasi selanjutnya dapat dijelaskan dengan gambar kondisi bangunan rumah tangga penduduk miskin di Kabupaten Magelang sebagai berikut

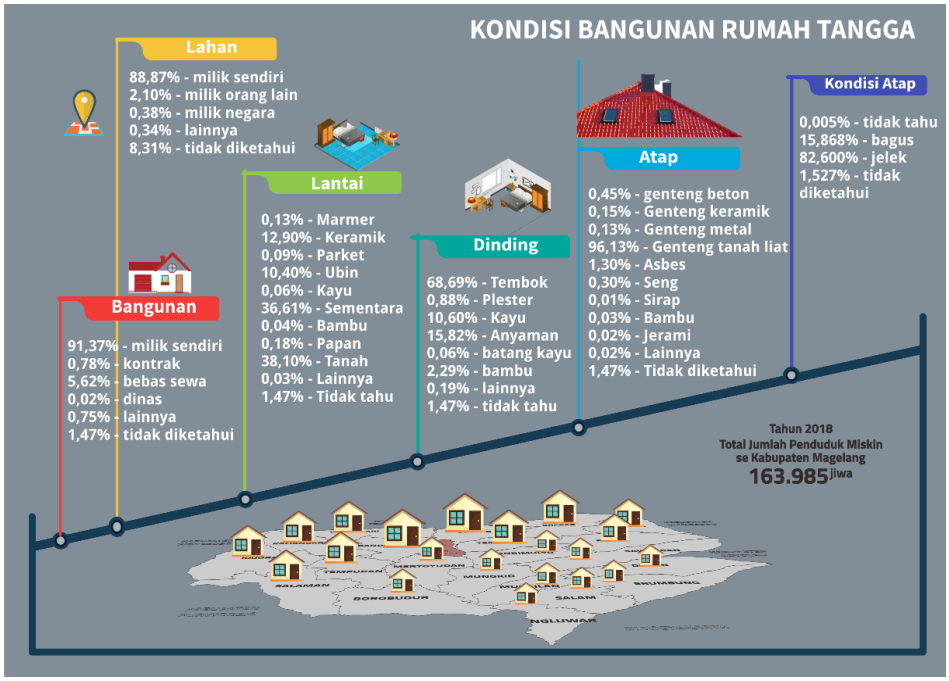

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, Digambar oleh peneliti, 2019

Gambar 3. Kondisi Bangunan Penduduk Miskin tingkat Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

Pada indikator bangunan, sebanyak 91,37% merupakan bangunan yang dimiliki sendiri, 5,62% merupakan bangunan bebas sewa dan sisanya adalah bangunan kontrak, milik diinas dan lainnya. Kemudian untuk kepemilikan lahan, didominasi sebesar 88,87% merupakan lahan yang dimiliki sendiri, sebesar 2,10% adalah lahan yang dimiliki orang lain dan sisanya adalah lahan milik negara dan lainnya. Untuk kondisi dinding dapat dijelaskan hampir semua bangunan sudah berdinding tembok yang mencapai 68,69%, selanjutnya untuk atap dominasi bangunan memiliki atap berupa genteng dari tanah liat sebanyak 96,13% sisanya menggunakan bahan lain seperti genteng beton, asbes, bambu, jerami, sirap dan lainnya. Namun dari akumulasi bahan atap tersebut sebanyak 82,60% dalam kondisi rusak.

Deskripsi kondisi bangunan selanjutnya adalah instalasi terpasang pada bangunan, baik berupa instalasi listrik dan instalasi air minum, bahwa sumber air yang dapat diakses oleh 163.985 jiwa yang tergolong dalam penduduk miskin sebanyak 40,23% berasal dari mata air yang terlindung, sebanyak 21,61% bersumber sumur terlindung, 12,84% bersumber dari sumur tidak terlindung dan 8,24% berasal dari mata air tidak terlindung, sisanya bersumber dari air sungai, air isi ulang, air hujan dan lainnya. Selanjutnya dari cara memperoleh sumber air didominasi dengan cara tidak membeli,

sebesar 85,35% sedangkan 11,01% bersumber dari langganan, sisanya membeli eceran dan cara lainnya.

Untuk instalasi sambungan listrik pada dasarnya sudah terdistribusi yang ditunjukan dengan jumlah yang telah menggunakan mencapai 97,48% melalui PLN, sedangkan sisanya melalui non PLN dan bukan listrik. Untuk besaran daya sambungan listrik terpasang masih banyak yang menggunakan daya sebesar 450 watt yaitu sebanyak 71,89%, tanpa meteran sebanyak 20,84% dan yang menggunakan daya sebesar 900 watt baru sebanyak 4,47%, sisanya menggunakan daya lebih dari 1300 watt.

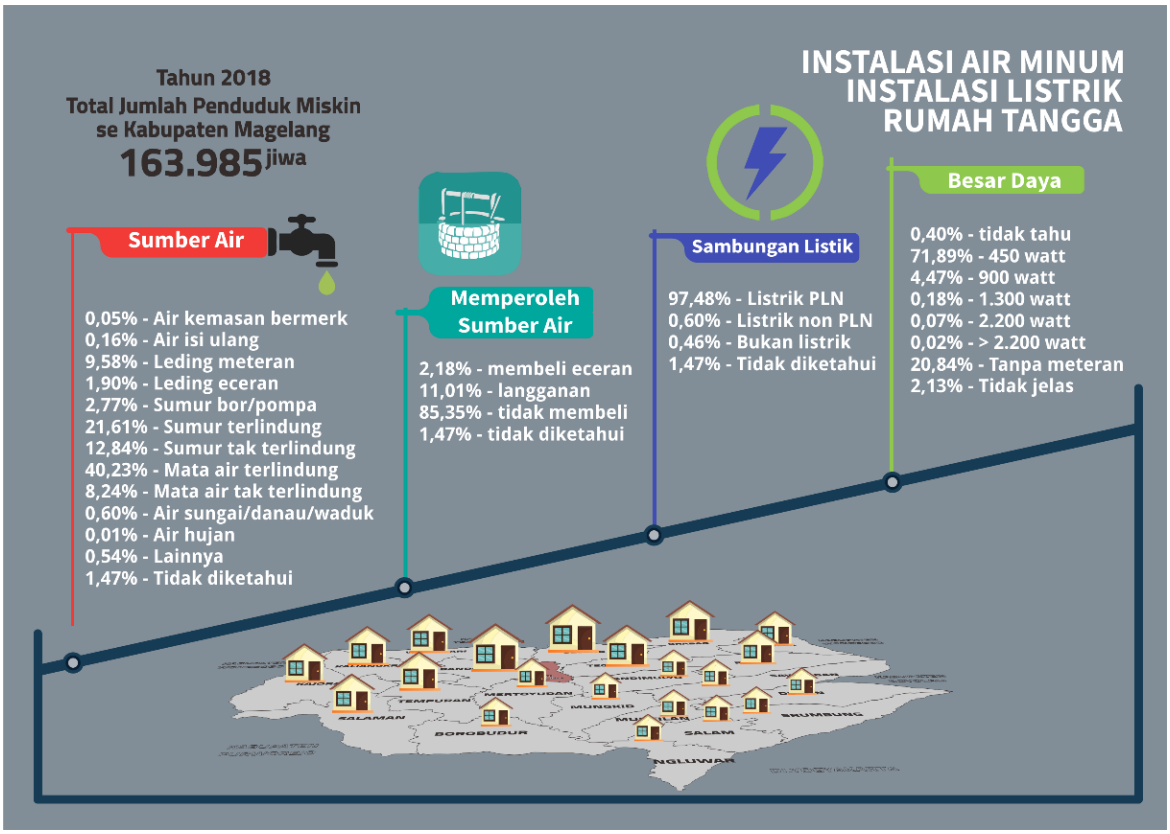

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, Digambar oleh peneliti, 2019

Gambar 4. Instalasi Rumah Penduduk Miskin tingkat Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

Indikator berikutnya adalah asset yang dimiliki rumah tangga, seperti yang tercantum dalam basis data terpadu, sebanyak 163.985 orang 97,47% tidak memiliki telepon. 72% sudah memiliki televisi, 92,59% tidak memiliki lemari es, 95,47% tidak memiliki emar, 97,18% tidak memiliki notebook, 82,76 tidak mempunyai sepeda, namun memiliki kendaraan roda dua atau sepeda motor sebanyak 55,63%.

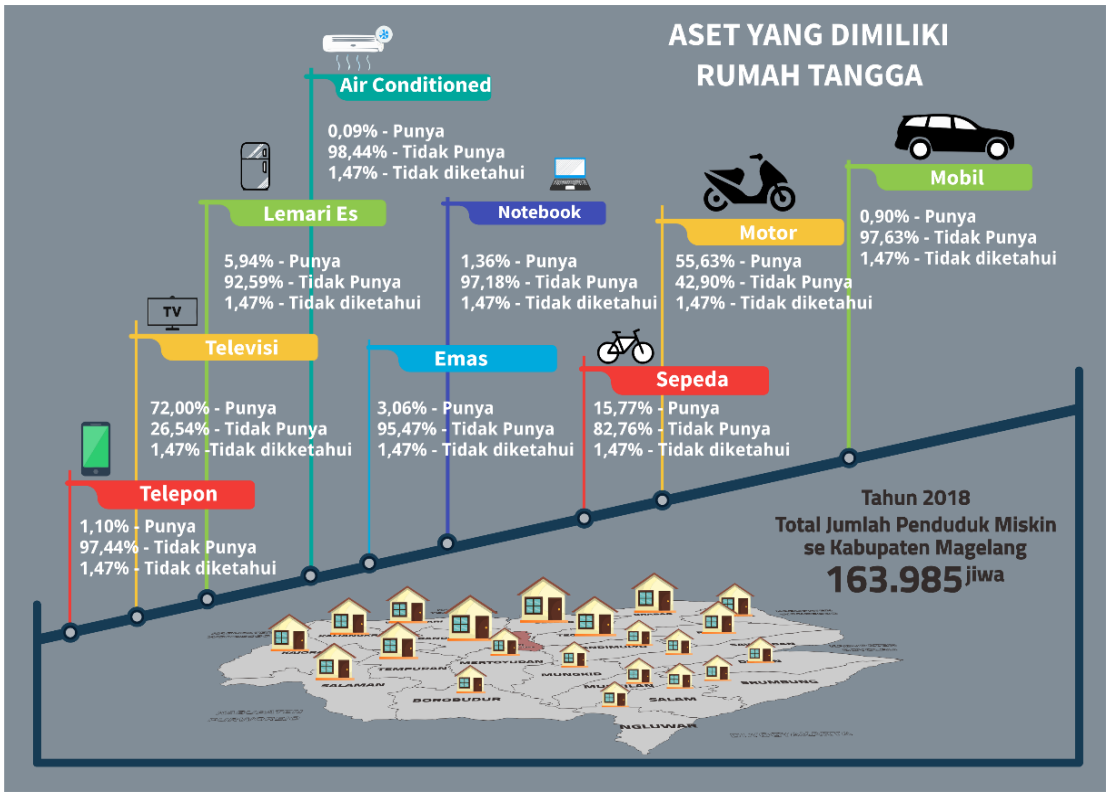

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, Digambar oleh peneliti, 2019

Gambar 5. Aset Penduduk Miskin tingkat Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

Dalam pembahasan ini disajikan pula intervensi yang berhubungan dengan percepatan pengentasan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun inisiatif masyarakat.

Dalam program Keluarga Sejahtera sebanyak 43, 54% mengikutinya sedangkan sebanyak 55% tidak mengikutinya, kondisi ini tentunya perlu menjadikan perhatian bersama agar terjadi peningkatan kuantitas penduduk miskin yang mengikutinya. Program Indonesia Pintar porsi yang mengikuti jauh lebih kecil dibandingkan Keluarga Sejahtera yaitu hanya sebesar 8,2%, sebanyak 90,23% tidak mengikuti program ini, seharusnya program ini menjadi salah satu program yang dapat diimplementasikan lebih dominan karena Pendidikan memiliki korelasi yang signifikan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya pada program Indonesia Sehat, sudah sebanyak 71,85% telah mengikuti program ini, sebanyak 26,68% tidak mengikuti, ini menunjukan upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan derajat kesehatan lebih massiv. Akses terhadap Program BPJS Mandiri secara kuantitas relative sedikit yaitu sebesar 1,26% sementara sebanyak 97,28% tidak mengakses layanan program ini.

Inisiasi masyarakat yang berusaha mengembangakan usahanya memiliki porsi yang cukup banyak, hal ini menunjukan bahwa pada dasaranya penduduk miskin juga berupaya untuk lepas dari jebakan kemiskinan dikuatkan dengan banyaknya

penduduk miskin yang memiliki usaha sebesar 41,78%. Kondisi ini perlu didorong agar sebanyak 56,2% juga dapat melakukan hal yang sama.

Program Jamsostek pada data yang ada terdapat informasi bahwa hanya sebanyak 1,35% saja yang mengakses layanan ini sementara sebanyak 97,19% tidak memiliki akses terhadap program jamsostek ini. Program Kredit Usaha pun sama halnya dengan program sebelumnya, sebanyak 1,82% yang dapat mengakses layanan ini sementara sebanyak 96,72% belum dapat mengakses layanan yang dapat meningkatkan usaha mereka dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

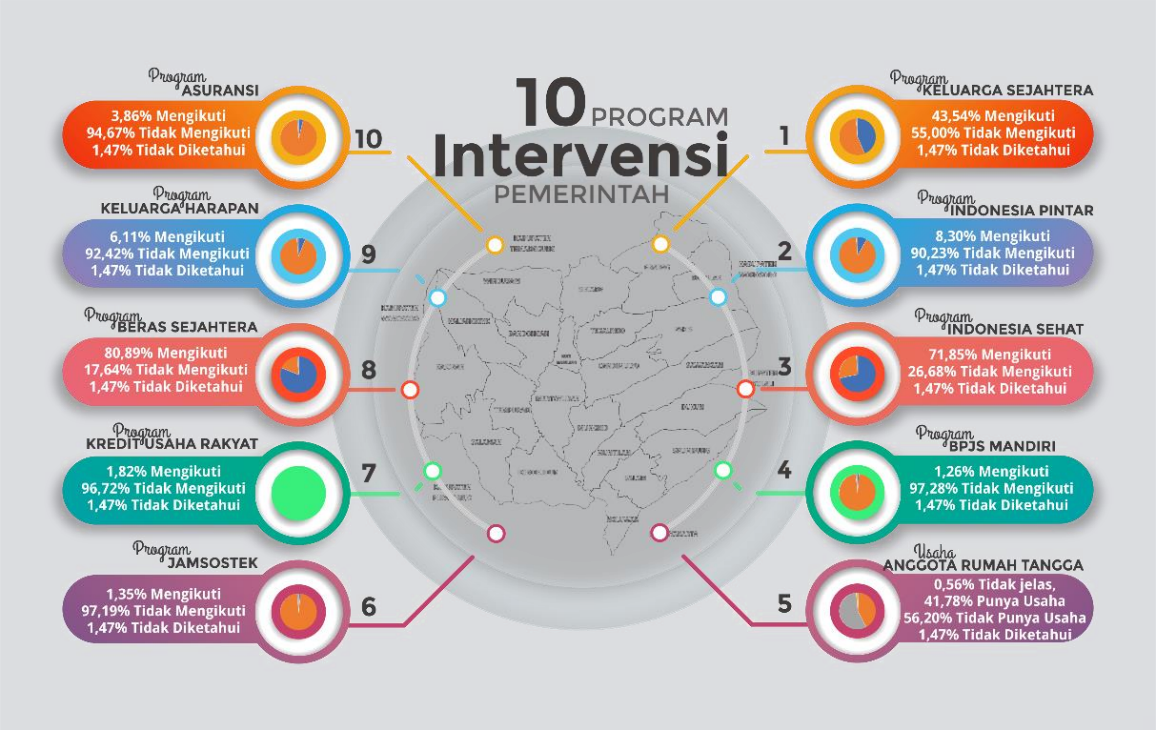

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, Digambar oleh peneliti, 2019

Gambar 6. Intervensi Pemerintah dan inisiasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Program Beras Sejahtera merupakan program yang paling banyak dirasakan, sebesar 80,89% sudah mengakses program ini dan sisanya sebanyak 17,64% belum mengikutinya. Sementara itu untuk Program Keluarga Harapan sebanyak 6,11% sudah mengikutinya dan 92,42% belum mengikutinya dan Program Asuransi juga tidak berbeda dengan Program Keluarga Harapan, sebanyak 3,86% yang mengikuti dan 94,67% belum mengikuti program ini.

Strategi

Tahapan minimal yang harus dilalui dalam menyusun Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan mengacu pada Perda Kabupaten Magelang nomor 5 tahun 2008 meliputi : a.Analisis awal kemiskinan kabupaten. b.Analisis kemiskinan di tingkat komunitas. c.Analisis kemiskinan di tingkat sektoral.

d.Analisis kebijakan dan program yang telah dilakukan. e.Perumusan Strategi dan Rencana Tindak. f.Konsultasi publik.

Namun dari temuan-temuan utama yang muncul dari BDT memberikan gambaran kemiskinan yang baru dan lebih terperinci ini pada dasarnya mengungkapkan pola keseluruhan dari heterogenitas yang menonjol dalam indikator kesejahteraan dan sumber pendapatan di antara kaum miskin meskipun masih memerlukan verifikasi data yang berkelanjutan. Konsekuensinya, memerlukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dibingkai dalam kerangka serangkaian kebijakan terpadu yang menyediakan solusi implementatif dari kemiskinan yang disesuaikan dengan *crosssection heterogen* dari kelompok rumah tangga miskin.

Alokasi sekelompok kondisi miskin yang heterogen ke dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai untuk masing-masing stakeholder adalah tugas yang menantang yang memerlukan desain dan implementasi portofolio kebijakan terintegrasi. Strategi mengacu pada (The World Bank, 2003) di bawah ini merangkum sekumpulan pilihan kebijakan yang diidentifikasi dalam laporan ini dan berfungsi untuk menyoroti kebijakan inti, sifat lintas sektor dari beberapa kebijakan (misalnya, penting dalam konteks berbagai cara dalam percepatan penanggulangan kemiskinan) dan sifat sinergis tertentu kebijakan (misalnya, kebijakan yang saling memperkuat ketika diterapkan secara bersamaan).

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pendekatan lima strategi dengan delapan pilihan kebijakan terpadu. Pendekatan ini mengadopsi dari upaya (The World Bank, 2003) dalam menyelesaikan kemiskinan pada negara-negara miskin, yang telah disesuaikan dengan karakteristik percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang, seperti dalam gambar berikut

Sumber : Peneliti, 2019

Gambar 7. Pendekatan Lima Strategi Dengan Delapan Pilihan Kebijakan Terpadu

Lima Srategi Pendekatan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dipertimbangkan:

1.Intensifikasi Pertanian dari Sektor Pertanian Kecil

Kebijakan pertanian yang diarahkan pada pertanian skala kecil dengan produktivitas rendah harus menjadi prioritas terutama sebagai bagian dari strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dibandingkan dengan program pertumbuhan pertanian. Bidang kebijakan yang krusial adalah reformasi pasar tanah dan keuangan pedesaan, peningkatan litbang dan transfer teknologi, memasok barang publik, dan membangun modal sosial. Temuan utama dalam konteks percepatan penanggulangan kemiskinan yang potensial ini adalah bahwa pengembalian ke lahan pertanian sangat tergantung pada tingkat produktifitas pelengkap.

Strategi yang berkaitan dengan faktor demografis, berdampak pada lahan yang memiliki produktivitas besar dan dampak peningkatan pendapatan dalam pertanian, tampaknya perlu untuk secara bersamaan meningkatkan tingkat faktor-faktor lain. Ini memperkuat kebutuhan akan kerangka kerja kebijakan terintegrasi yang mengakui sinergi ini dan menjadikannya berperan. Temuan pada BDT menyatakan sekitar 56,2 persen dari total perkiraan miskin di Kabupaten Magelang ditemukan di antara rumah tangga pertanian dan produktivitas rendah. Apa yang harus diteliti lebih lanjut pada tahap ini adalah seberapa besar bagian dari kelompok sasaran ini yang dapat secara efektif mengejar percepatan penanggulangan kemiskinan ini.

2.Sektor Pertanian Komersial Yang Lebih Dinamis

Sektor pertanian komersial yang direvitalisasi dapat meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan pedesaan secara langsung dengan menyerap tenaga kerja upahan dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan industri pengolahan hilir. Sebagai contoh, efisien, perluasan pasar yang digerakkan agar dapat menciptakan peluang baru.

Yang penting untuk pertumbuhan dan peningkatan lapangan kerja di sektor ini adalah perbaikan dalam cara kerja faktor pasar, tenaga kerja, air, tanah, dan modal. Dari perspektif penduduk miskin, tingkat pendidikan yang lebih baik dan reformasi peraturan ketenagakerjaan akan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian komersial.

3.Menstimulasi Pertumbuhan Sektor Pedesaan Non Pertanian

Sektor Pedesaan Non Pertanian yang berkembang dapat meningkatkan lapangan kerja di pedesaan, terutama di sektor pemrosesan makanan dan jasa, dan dengan demikian mengurangi kemiskinan. Namun, strategi ini kemungkinan tidak dapat dilakukan untuk sebagian besar masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil, kepadatan rendah, dan daerah pedesaan yang lebih miskin. Secara keseluruhan, bukti untuk wilayah lain dalam beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sektor Pedesaan Non Pertanian lebih besar ditemukan di daerah yang lebih baik layanan infrastrukturnya, seperti jalan, listrik, dan komunikasi.

Dengan kata lain, Sektor Pedesaan Non Pertanian terkonsentrasi di area di mana faktor dan pasar produk bekerja lebih baik dan biaya transaksi lebih rendah. Ini biasanya menyiratkan bahwa mereka berkembang di dekat daerah perkotaan. Lebih lanjut, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa: lebih banyak sekolah

dan akses ke infrastruktur seperti itu secara signifikan meningkatkan kemungkinan pengembalian tinggi versus rendahnya kesempatan kerja Sektor Pedesaan Non Pertanian dan bahwa walaupun perempuan sangat terwakili dalam sektor Sektor Pedesaan Non Pertanian, mereka biasanya dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan yang berpendapatan rendah (misalnya, layanan rumah tangga). Bahan-bahan penting untuk merangsang pengembangan ekonomi non-pertanian pedesaan yang dinamis adalah tingkat pendidikan yang lebih baik, infrastruktur dasar yang baik, membangun modal sosial, dan pasar tenaga kerja dan kredit yang berfungsi dengan baik.

4.Migrasi Orang Muda

Sementara pekerjaan analitik tentang proses migrasi (misalnya, pada faktor-faktor penentu migrasi) dan konsekuensi migrasi bagi penduduk berada di luar ruang lingkup studi saat ini, migrasi ke daerah perkotaan dan kota-kota pedesaan tampaknya tak terhindarkan dan bahkan diinginkan, mengingat tingginya insiden kemiskinan pedesaan, jumlah absolut yang sangat besar dari pertanian yang sangat kecil dikombinasikan dengan ukuran rata-rata rumah tangga yang agak besar, dan potensi pertumbuhan pertanian yang relatif rendah di daerah luas lahan pertanian. Temuan dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu migrasi perlu dipahami dan dianalisis secara lebih baik dengan eksplisit memasukkan heterogenitas di antara rumah tangga pedesaan yang miskin (misalnya, dalam hal usia, pendidikan, jenis kelamin, asset yang dimiliki dan jarak ke peluang kerja yang menjanjikan). Kurangnya data deret waktu dengan pendapatan yang dapat diandalkan dan data karakteristik rumah tangga merupakan faktor pembatas utama yang menjelaskan kelangkaan analisis empiris semacam itu. Terlepas dari kelangkaan analisis empiris saat ini tentang faktor-faktor penentu migrasi, baik temuan deskriptif maupun pengalaman di wilayah lain memberikan beberapa petunjuk untuk penelitian lebih lanjut dan agenda kebijakan. Perbedaan pendapatan adalah kekuatan pendorong tunggal terbesar yang menjelaskan tingkat migrasi. Perbedaan upah dan rasio produktivitas tenaga kerja biasanya cukup untuk menjelaskan sebagian besar tingkat migrasi di antara pekerja pertanian yang tidak memiliki tanah. Namun, sebagian besar masyarakat miskin pedesaan adalah petani kecil/penggarap/pekerja informal dan untuk menganalisis proses migrasi untuk kelompok ini orang harus memperhitungkan sumber pendapatan lain, yang lebih sulit karena ketersediaan data dan kendala keandalan. Ada sumber pendapatan tertentu, tanah misalnya, yang tidak sepenuhnya dapat dialihkan saat bermigrasi. Ini meningkatkan kemungkinan interaksi yang kuat antara pasar tanah dan proses migrasi. Calon migran, terutama yang miskin, umumnya ingin membawa serta seluruh modalnya. Dalam kasus petani, ini membutuhkan penjualan modal fisik dan lahan khusus pertanian. Kurangnya sertifikat tanah dan pasar tanah yang berfungsi dengan baik akan menghalangi penjualan tanah dengan harga yang mencerminkan nilai ekonomisnya.

Faktor kedua yang menghambat migrasi adalah sumber daya manusia khusus pertanian (misalnya, keterampilan dan pengalaman dalam pertanian yang umumnya diperoleh atas dasar belajar sambil bekerja) yang tidak dihargai pada pengembalian yang sebanding di luar

sektor pertanian. Ini khususnya bermasalah bagi calon migran yang lebih tua karena tidak banyak yang bisa dilakukan untuk melonggarkan kendala ini. Ini menggarisbawahi pentingnya berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, bantuan sosial generasi pedesaan yang saat ini muda dan berusaha untuk memberi mereka kemampuan tingkat dasar sumber daya manusia spesifik sektor. Lebih banyak kesempatan pelatihan dan pendidikan untuk kaum miskin pedesaan tampaknya menjadi variabel kebijakan paling penting untuk memfasilitasi penyerapan ini ke sektor-sektor ekonomi lainnya. Migrasi tidak hanya akan menguntungkan migran tetapi dalam banyak kasus juga anggota rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan melalui pengiriman uang.

5.Penyediaan Jaring Pengaman bagi mereka yang "Terperangkap" dalam Kemiskinan

Ada sekelompok orang miskin pedesaan yang tidak akan dapat mengambil manfaat dari peluang dalam pertanian komersial, dari intensifikasi skala kecil, atau dari migrasi. Anggota kelompok ini biasanya lebih tua, sering janda, dan kadang-kadang pekerja pertanian di daerah yang diberkahi dengan buruk. Kelompok ini "terjebak" dalam kemiskinan ekstrem tanpa masa depan yang layak di bidang pertanian di luar subsisten. Anggota kelompok ini menghadapi hambatan besar dalam mencari pekerjaan di luar pertanian. Untuk kelompok ini, jaring pengaman sosial, misalnya dalam bentuk pensiun, sangat penting untuk memastikan standar hidup layak yang dasar. Tantangan desain utama dari program jaring pengaman terletak pada membuatnya secara administratif dapat diakses oleh masyarakat miskin pedesaan yang tinggal di daerah terpencil, kepadatan penduduk rendah yang ditandai dengan tingginya tingkat buta huruf. Selain mengenali multi-dimensionalitas dari jalur keluar kemiskinan potensial dan opsi kebijakan, kerangka kerja strategis untuk aksi juga harus mengakui sisi antar generasi kemiskinan pedesaan. Oleh karena itu, upaya paralel untuk menjangkau kaum muda (terutama di rumah tangga termiskin dan mereka yang sangat bergantung pada ketentuan jaring pengaman) melalui pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial sangat penting untuk memberi mereka peluang untuk keluar dari lingkaran setan di mana para generasi sebelum mereka terperangkap.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang berdasar pembahasan utamanya data ART dan intervensi pemerintah dilihat dari Kelembagaan, merujuk pada Perda 5 tahun 2008 memerlukan model kelembagaan secara parsial pada tiap kecamatan disesuaikan dengan BDT, meskipun data tersebut masih memerlukan perawatan terhadap validitas dinamika informasi yang ada di dalamnya.

Strategi, seperti yang telah disampaikan terdiri dari lima pendekatan, 1)Intensifikasi Pertanian dari Sektor Pertanian Kecil, 2)Sektor Pertanian Komersial yang lebih Dinamis, 3)Menstimulasi Pertumbuhan Sektor Pedesaan Non Pertanian, 4)Migrasi Orang Muda dan 5)Penyediaan Jaring Pengaman bagi mereka yang "Terperangkap" dalam Kemiskinan.

Rekomendasi

Beberapa opsi rekomendasi dari hasil temuan pada kajian ini adalah :

1) Perencanaan yang matang, sejalan dengan proses perencanaan yang umumnya dituangkan dalam RPJMD menjadikan komitmen yang kuat dan prioritas utama, target angka kemiskinan pada tahun-tahun mendatang yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya memerlukan penekanan pada aspek fungsi perencanaan yang efektif dan sesuai dengan sasaran.
2) Anggaran yang sesuai, jelas mempengaruhi percepatan penanggulangan kemiskinan, namun kejelian pada variable mana yang akan diintervensi anggarannya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, utamanya yang memiliki hubungan kausal positif, anggaran kesehatan dan anggaran bantuan social dari belanja tidak langsung.
3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam proses pengelolaan percepatan penanggulangan kemiskinan baik untuk penguatan sisi anggaran, data, kelembagaan dan strategi hulu hingga hilir berbasiskan pada Litbang dan Teknologi.
4) Dukungan data yang valid berkelanjutan, dengan menggunakan teknologi informasi dan inovasi pada intervensi kemiskinan, dalam basis data terpadu yang sudah merupakan dasar dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan penting untuk dilakukan perawatan data, sehingga akurasi kuantitas data dapat dimanfaatkan dalam mengambil tindakan intervensi yang perlu dilakukan.
5) Strategi yang tepat dan sinergi kelembagaan, merupakan upaya kualitatif yang bersifat parsial, basis data terpadu sudah menunjukan adanya peta kemiskinan yang berbeda antar kecamatan, sehingga tidak dapat digeneralisasikan intervensi yang dilakukan, oleh karenanya strategi menjadi penting baik dalam konteks makro maupun teknis yang melibatkan sinergisitas antara perangkat daerah. Strategi penting dari hasil temuan kajian ini adalah pada bentuk intervensi yang dilakukan, di antaranya :

1) KKS/KPS, Cakupan yang sudah diintervensi baru mencapai 43,54% dari jumlah keluarga yang terdata diperlukan dalam koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara Bappeda (Tim SKPD), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2) KIP, dengan akses sebanyak 8,3% dari total Rumah Tangga Miskin diperlukan identifikasi tentang jumlah anggota rumah tangga yang berada dalam batas usia sekolah, di samping itu data yang lebih akurat dan valid terkait keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun, anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.
3) KIS, Cakupan yang terdata sudah mencapai 71,85% mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS dan menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

4) BPJS Kesehatan peserta mandiri, dengan cakupan yang relative masih sedikit yaitu sebesar 1,26% yang memiliki Kartu BPJS Kesehatan dimana iurannya dibayar secara mandiri, perlu ditingkatkan melalui pengembangan kepastian pekerjaan dengan melakukan pelatihan kemampuan kerja modern.
5) Jamsostek, Akses ini baru sampai pada 1,35% terhadap seluruh rumah tangga yang terdapat pada Basis Data Terpadu, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bersifat wajib karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang layak yang diberikan kepada setiap pekerja yang telah membayar iuran. Program ini juga sebagai pengaman bagi rumah tangga dalam menghadapi jebakan kemiskinan.
6) Asuransi kesehatan lainnya, program ini memiliki keterkaitan dengan pemerintah dalam rangka intervensi kemiskinan meskipun dilaksanakan oleh pihak privat namun dapat ditingkatkan dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dengan sector privat agar menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan, berupa rawat inap dan rawat jalan. Sehingga dapat meningkatkan cakupan yang baru mencapai 3,86% terhadap rumah tangga miskin.
7) PKH, mencapai 6,11% rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. Ketersediaan data yang valid perlu diverifikasi sehingga sasaran PKH yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program.
8) Raskin, Pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah ini mencapai 80,89%, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Validitas data apabila distribusi sudah sesuai dengan sasaran dapat digunakan sebagai salah satu referensi terhadap program percepatan pengentasan kemiskinan.
9) KUR, merupakan salah satu sistim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan model yang berkembang dan bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan akses yang sedang mencapai 1,82% melalui model kelompok yang kemudian dikelola secara internal kelompok.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya Bappeda yang telah

memberikan fasilitasi anggaran untuk kajian ini dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang yang telah memberikan dukungan data.

DAFTAR PUSTAKA

Avais, M. (2015) 'Financial Innovation and Poverty Reduction : Evidence From Rural', *International Journal of Scientific and Research Publications*, 4(1), pp. 1–4.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, K. K. (2010) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tanggal 25 Februari 2010*. Indonesia.

FAO (2018) *FAO Strategic Programme to Reduce Rural Poverty, Tackling poverty and hunger through*.

Harris, L. V. A. (2011) *Idea Engineering Creative Thinking and Innovation, Campaign*. New York: MOMENTUM PRESS, LLC.

Leoncini, R. and Montresor, S. (2008) *Innovation and the Creative Process, Towards Innovation with Care*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

Millard, J. *et al.* (2016) 'Social innovation for poverty reduction and sustainable development: Some governance and policy perspectives', *ACM International Conference Proceeding Series*, 01-03-Marc(January 2019), pp. 153–162. doi: 10.1145/2910019.2910079.

Pansera, M. and Martinez, F. (2017) 'Innovation for development and poverty reduction: an integrative literature review', *Journal of Management Development*, 36(1), pp. 2–13. doi: 10.1108/JMD-02-2015-0013.

Pemerintah Kabupaten Magelang (2008) *Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Magelang Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5 tanggal 22 April 2008*. Indonesia.

Pollitt, C. (2011) *Innovation in the Public Sector Linking Capacity and Leadership - IIAS Series : Governance and Public Management*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Soubbotina, T. P., World, T. and Washington, B. (2004) 'Beyond Economic Growth An Introduction to Sustainable Development Second Edition WBI LEARNING RESOURCES SERIES'. Available at: www.worldbank.org/wbi/developmenteducation.

The World Bank (2003) *Rural Poverty Alleviation in Brazil*.

TNP2K (2017) *Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi/Validasi Rumah Tangga Dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*.